PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MELARIKAN WANITA YANG BELUM CUKUP UMUR PUTUSAN /36/Pid.B/2019 PN GST

Sinta Nuriyah¹, Ahmad Mahyani²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: sinta.nuriyah660@gmail.com, mahyani.fh@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Jenis dari kejahatan terhadap kebebasan manusia dalam Bab II Bab XVIII KUHP, yang khusus diselidiki pada Pasal 332 KUHP, yang berarti melarikan perempuan yang belum dewasa. Kajian ini menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana perempuan lanjut usia yang melarikan diri dan pertimbangan secara hukum bagi hakim memutus tindak pidana dimana perempuan lanjut usia tidak cukup. Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat normatif, dikarenakan perbuatan pidana yang melarikan perempuan yang belum dewasa penerapan pidana tidak sesuai pasal 332 KUHP yaitu konflik Pasal 332 KUHP dan keputusan hakim. Orang yang melarikan dengan wanita yang terlalu sedikit hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika telah memenuhi kriteria pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini dapat dipidana penjara maksimal 7 tahun sesuai Pasal 332 Ayat (1) ke – 1 KUHP. Landasan pendapat hakim untuk memberikan putusan pada kasus melarikan perempuan yang usianya belum dewasa merupakan bahan pertimbangan secara hukum yang didasarkan pada fakta hukum di pengadilan untuk pembuktian kesalahan dari terdakwa.

Kata Kunci : Pidanaan, Pelaku, Tindak Pidana, Melarikan Wanita Belum Cukup Umur.

ABSTRACT

This type of crime against human freedom in Chapter II Chapter XVIII of the Criminal Code, which is specifically investigated in Article 332 of the Criminal Code, which means running away from an underage woman. This study explains the criminal responsibility of elderly women who have run away and legal considerations for judges deciding crimes where elderly women are not sufficient. This study uses normative research, due to criminal acts that run away from immature women. The application of punishment is not in accordance with Article 332 of the Criminal Code, namely the conflict between Article 332 of the Criminal Code and the judge's decision. People who run away with too few women can only be held accountable if they meet the criteria of criminal responsibility, in this case they can be sentenced to a maximum of 7 years in prison according to Article 332 Paragraph (1) 1st of the Criminal Code. The basis for the opinion of the judge to give a decision in the case of running away from a girl who is not yet an adult is a matter of legal consideration based on legal facts in court to prove the guilt of the defendant.

Keywords: Punishment, Perpetrators, Criminal Acts, Escaping Underage Women.

PENDAHULUAN

Dengan berkembangnya zaman kejahatan semakin banyak bermunculan, kejahatan merupakan fenomena sosial asusila yang berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Kejahatan adalah kegiatan yang merupakan pelanggaran bertentangan terhadap norma yang ada di masyarakat. Perbuatan kejahatan tersebut disebabkan karena akibatnya sangat menimbulkan kerugian pada masyarakat, merusak harta dan benda, kehormatan nama, dan jiwa. Pelanggaran aturan dikenakan sanksi, yang tujuannya adalah untuk mempersulit orang

tersebut melakukan kejahatan dan untuk memberi pelajaran kepada penjahat dan masyarakat umum. (Munajat 2004:5).

Manusia, sebagai makhluk sosial, berinteraksi satu sama lain dan dengan makhluk lain, dan dibatasi hukum yang memberikan pengaturan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Menurut pendapat Ahmed Ali, hukum sebagai aturan atau prakarsa pada suatu sistem tentang apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan warga negara pada kehidupan sosialnya.

Hukum pidana merupakan bagian dari ilmu hukum. W.L.G. Lemaire mengatakan bahwa hukum pidana yang terdiri dari rangkaian norma yang memuat perbuatan dan bukan perbuatan, oleh pembuat aturan dilekatkan sanksi berupa pemidanaan, yaitu penderitaan khusus. Dengan demikian, dapat dikatakan pula bahwa hukum pidana adalah suatu sistem norma yang menentukan perbuatan-perbuatan dengan mana sesuatu dilakukan atau tidak dilakukannya sesuatu, apakah sesuatu itu terpaksa, dan dalam keadaan apa dapat dijatuhkan pidana, dan pidana yang dijatuhkan atas perbuatan-perbuatan itu. . bisa Rusli Effendy menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan yang berlaku dalam suatu negara yang memberikan landasan dan aturan:

1. tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan dilakukan dan yang ada pelarangan serta mencantumkan bentuk ancaman atau jenis sanksi yang bersifat pidana khusus terhadap semua orang yang melakukan pelanggaran tersebut.
2. Untuk menentukan waktu kapan dan hal apa pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dikutuk atau diancam hukuman.
3. Cari tahu bagaimana hukuman dapat dilakukan jika seseorang diduga melakukan pelanggaran tersebut.

Hukum pidana mempunyai 2 (dua) jenis yaitu pelanggaran ringan dan kejahatan. Hukum pidana secara positif mengatur hal ini pada KUHP. Kejahatan pada Buku II dan pelanggaran ringan dalam Buku III. Menurut pasal 1 KUHP, ketentuan aturan harus dilakukan perumusan setepat mungkin. Hal ini merupakan prinsip *lex certa*, yang mana hukum harus secara tegas dan jelas membatasi kekuasaan pemerintah atas rakyat. Pemahaman Pasal 1 KUHP berkaitan dengan inti Pasal 3 KUHP, bahwa hukum pidana dilaksanakan dengan adanya prosedur yang tepat dan adanya jaminan secara hukum.

Anselm von Feuerbach memberikan perumusan asas legalitas, yaitu :

1. *Nullapoena sine lege* : tiada pidana tidak adanya ketentuan undang-undang.
2. *Nullapoena sine crimine* : tiada pidana tidak adanya perbuatan yang bersifat pidana.
3. *Nullumcrimen sine poena legal* : tiada pidana tidak adanya pidana menurut undang-undang.

Kejahatan terhadap kebebasan manusia diatur pada Buku XVIII KUHP, pembahasannya pada Pasal 332 KUHP. Pada Bab XVIII KUHP yang memberikan pengaturan tentang kejahatan pada kebebasan pribadi yang terdapat 14 (empat belas) pasal. Berdasarkan teori terdapat beberapa tindakan, termasuk mengambil seseorang untuk menguasainya (Pasal 328); Pengangkutan orang yang belum dalam kondisi mayoritas (Pasal 330); Penculikan wanita yang usianya belum cukup umur (Pasal 332); secara melawan hukum melakukan perampasan terhadap kemerdekaan yang dimiliki seseorang (Pasal 333). Tindakan yang disebutkan dalam Pasal 333 KUHP sering disebut sebagai penculikan.

Mengenai Pasal 332 KUHP yang memberikan pemahaman sebagai penghilangan wanita belum dewasa dengan adanya maksud atas penguasaannya, dalam dalam masyarakat sering adanya pengkaitan dengan istilah kawin lari. Sehingga dapat diartikan kawin lari terjadi antara laki-laki dengan perempuan yang menikah tanpa adanya persetujuan keluarga. Masyarakat umum beranggapan faktor ekonomi dan sosial menjadi sebab yang terutama kejadian pelarian.

Kedudukan anak sebagai pembawa harapan cita yang luhur bagi bangsa, sebagai penerus dalam memimpin bangsa pada masa depannya serta suatu harapan bagi kaum generasi yang sudah ada harus dilindungi untuk memperoleh suatu kesempatan yang sebesar-besarnya untuk kehidupan secara normal, secara mental, fisik dan sosial. Perlindungan terhadap anak adalah upaya dan tindakan masyarakat dalam menjalankan misi dan peran berbeda, memberikan kesadaran tentang pentingnya anak bagi bangsa dan masa depan bangsa. Ketika mereka telah baik dalam pertumbuhan secara fisik atau mental dan kehidupan sosialnya, yang pada saatnya menggantikan pada generasi sebelumnya (Gultom 2014:97).

Atas dasar ini, UU Perlindungan Anak dirumuskan, mengingat Perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari upaya pembangunan nasional, yang pada khususnya dengan tujuan

memajukan kehidupan negara. Perlindungan terhadap anak harus dilakukan sejak awal pada kandungan sampai dengan anak mencapai usia 18 tahun.

Kejahatan di masyarakat semakin meningkat dan salah satunya adalah pelarian gadis yang berusia di bawah umur. Kasus pelarian perempuan di bawah umur tidak hanya terjadi di kota-kota besar tetapi juga di banyak daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, penipuan menjadi pemicu utama kaburnya perempuan di bawah umur. Terutama perempuan yang sekolah SMP dan SMA, ketika kondisi mentalnya tidak stabil, yang membuat mudahnya terjerat oleh segala sikap bohong dari lawan jenis, baik secara sadar maupun tidak ikut kemauan lawan jenis. . Kemajuan teknologi dapat memicu kejahatan ini, misalnya, mulai dengan pengenalan seluler melalui Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, lalu lanjutkan dengan bertemu. Akhirnya, kejahatan melarikan diri dari perempuan di bawah umur juga bisa terjadi di perusahaan yang tidak pantas sampai korban yakin dan siap untuk membawanya. Pergaulan yang salah juga sangat berpengaruh, ditambah lagi dengan adanya kelemahan pada pengawasan yang diberikan oleh orang tua dan minimnya pendidikan tentang agama.

Tentu saja kasus-kasus tersebut semakin meningkat dan menjadi suatu permasalahan karena pelaku merupakan seorang yang dikenal dengan korban dan termasuk masalah yang pelik sehingga harus ada penyelesaian pada inti permasalahannya. Jika merujuk pada sejarah bahwa tindak pidana penculikan perempuan yang masih di bawah umur, dari berbagai zaman, tindak pidana membawa kabur terhadap perempuan yang usianya di bawah umur masih banyak kejadian.

Penyebutan pada kejahatan ini juga menggunakan melarikan perempuan. Padahal, apapun namanya, sudah pasti secara sastra itu adalah pelarian perempuan yang belum dewasa. Sementara itu, masalah perampokan diatur dalam Pasal 332 (1) KUHP dan memuat ciri-ciri kejahatannya, yaitu kejahatan yang dilaporkan. Artinya, kejadian ini tidak akan dianggap sebagai kejahatan di mata hukum tanpa ada yang melawan dan melakukan pelanggaran serta mengajukan pengaduan ke kepolisian, namun menurut norma sosial dan standar kesopanan, tindakan tersebut akan dan akan terjadi. pasti akan mendapat kritikan dari masyarakat dan harus diisi sesuai dengan adat setempat

Fenomena kaburnya perempuan masih menjadi kejahatan yang sering terjadi, bahkan dengan prihatin yang menjadi korban adalah usianya di bawah umur. Salah satu penyebab terjadinya tindak pidana jenis ini adalah perhatian yang kurang dari keluarga dan lingkungan tempat tinggal yang memberikan dukungan buruk sehingga terjadi perbuatan jahat.

Buronan kejahatan yang membawa kabur perempuan dengan usia di bawah umur harus ditindak secepatnya supaya anak-anak dapat menikmati masa kecil dengan bahagia dan aman. Sehingga selain aparat penegak dalam hukum tetapi seluruh lapisan keluarga dan masyarakat mempunyai peran yang aktif dengan melindungi dan mengawasi supaya tidak terjadi kejahatan. Adapun kriminalitas, segala sikap dan tindakan yang merugikan orang lain secara ekonomi, materiil maupun immateriil, serta disertai dengan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat harus dilakukan secara sukarela. Secara lebih sederhana, pengertian kejahatan sangat relatif sehingga kejahatan merupakan suatu tindakan yang melanggar norma yang ada di masyarakat.

Perempuan biasanya dipandang sebagai makhluk yang tidak kuat, sehingga terkadang menerima penghinaan, eksploitasi, atau penindasan. Sehingga dapat dikatakan tidak ada pembenaran untuk anggapan tidak penting terhadap nyawa atau menghina posisi seseorang. Pada akhirnya, mereka adalah umat Tuhan yang membutuhkan kesetaraan, dan kita juga harus menghormati dan menghargai mereka. Juga, jika kita tidak menghargai dan menghormatinya, kejahatan seolah-olah melakukan apa yang diinginkannya dengan wanita, memberi banyak alasan, sehingga wanita itu juga menggali kata-kata orang yang membuat tipu daya sehingga hukum menjadi rusak.

Salah satu jenis kejahatan terhadap kebebasan manusia. Tujuan melarikan perempuan adalah untuk ajakan, memohon atau memberikan bujukan dengan tujuan meninggalkan rumah tinggalnya. Tindakan ini harus menjadi tindakan aktif, bukan hanya doa. Perempuan yang dibawa pergi juga aktif bekerja, sehingga pelarian harus menjadi kegiatan bersama yang melibatkan pelaku dan korban secara aktif.

Pelarian seorang wanita tidak termasuk segala cara, baik sukarela maupun tidak, termasuk sukarela, yang termasuk pada pemahaman ini. Anak yang ditetapkan sebagai anak dengan usia di bawah umur atau belum dianggap menurut hukum mempunyai pengertian

yang luas, anak dalam beberapa kelompok umur yaitu kanak-kanak (0-12 tahun), remaja (13-20 tahun). tua) dan dewasa (21-25 tahun). Mereka yang belum berusia 18 tahun dianggap belum dewasa. UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 mendefinisikan perlindungan anak sebagai semua kegiatan yang memebrikan jaminan dan perlindungan terhadap anak serta haknya, agar dapat hidup dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal serta adanya perlindungan martabat kemanusiaan. terhadap kekerasan dan diskriminasi. Pada Pasal 332 Ayat 1 Nomor 1 KUHP, pelaku melakukan tindak kejahatan melarikan wanita yang tidak cakap dalam pengertian KUHP dapat dipidana dengan adanya hukuman penjara maksimal selama tujuh tahun. Siapa menculik wanita di bawah umur dengan maksud untuk memastikan kontrol internal dan eksternalnya tanpa kehendak orang tua atau wali, tetapi dengan persetujuan mereka, dihukum penjara hingga tujuh tahun. pernikahan Tindak pidana ini sebagai jenis delik terbuka serta langkah penuntutan terhadap delik terbuka hanya dapat dilakukan penerimaan jika pengaduan sudah diterima oleh korban atau orang yang berwenang mempersengkatakan. Pelanggaran melarikan diri dari perempuan di bawah umur adalah tindak pidana.

Jika berbicara tentang membawa kabur wanita dengan usianya belum cukup umur, selama ini dapat mempertanggungjawabkan jika sudah adanya pemenuhan unsur yang disebutkan:

a. Subjek

Pasal 332 ayat (1) dengan adanya subjek “barangsiapa” adalah seseorang laki-laki sebagai pelaku perbuatan pidana.

b. Objek

Jika subjeknya adalah laki-laki, maka dapat disimpulkan bahwa objeknya adalah perempuan atau perempuan, dan ini terkait dengan niat persetubuhan dan kemungkinan perempuan tersebut adalah pelaku hanya jika pelakunya laki-laki (bisa jadi pelaku), atau menggerakkan, atau memerintahkannya).

c. Membawa Pergi

Laki-laki adalah subjek yang disimpulkan objeknya merupakan perempuan dan adanya maksud melakukan perbuatan persetubuhan juga adanya hal yang memungkinkan seseorang perempuan menjadi pelaku yang hanya bila terdapat seseorang pria menjadi

pesertanya (mampu pePerbuatan "membawa pulang" yg dianggap pada pasal 332 ayat (1) pada dasarnya diperlukan adanya perbuatan yang aktif dari si pria. Tetapi pasal ini mampu diterapkan bila yang aktif si perempuan dan pria pasif. Membawa kabur seorang perempuan berdasarkan rumahnya umumnya ditujukan buat "menguasai" si wanitanya untuk sementara atau selamanya. Dalam pelanggaran hukum yang bersifat aduan yang dimohonkan bisa ditarik kembali selama masih ada tenggang saat tiga (3) bulan sesudah pengaduan (pasal 75). "Orang yg mengajukan pengaduan, berhak menarik pulang pada saat 3 bulan sesudah pengaduan diajukan". Pada berlakunya tenggang waktu saat 3 bulan dihitung sejak esok harinya berdasarkan pengajuan terhadap pengaduannya. Aturan diperbolehkan ditariknya kembali aduan menaruh adanya kemungkinan jika sesudah pengaduan tersebut diajukan, pengadu pikirannya berubah lantaran contohnya si produsen sudah mengajukan permohonan maaf dan memberikan pernyataan penyesalan atau sudah damai, sehingga pengadu dapat menarik pengaduannya selama pada saat 3 bulan sesudah pengaduan tersebut diajukan. Setelah pengajuan tersebut ditarik kembali, maka akan dapat diajukan kembali. Pertimbangan ini dapat dibenarkan jika dicermati bahwa terhadap penarikan atas adanya aduan yang dengan dasar alasan pada peniadaan terhadap penuntutan pada pidana yang bersifat khusus. Adanya penarikan kembali terhadap pengaduan, sehingga hak untuk melakukan penuntutan selanjutnya menjadi hapus.

Penghapusan hak untuk penuntutan, sehingga terhadap penuntutan yang masih proses berjalan selanjutnya menjadi gugur. Kondisi tersebut tidak sama menggunakan karena pertimbangan terdakwa meninggal yang menimbulkan hak untuk menuntut terdakwa menjadi hapus. Contoh perkara seseorang pasangan muda, yg dimana terdakwa tadi membawa lari korban yaitu tunangannya (Perempuan) yg masih dibawah umur tanpa seizin orang tuanya. Dan perkara ini membuat sebuah putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Gst yg output putusnya terdakwa terbukti secara absah & menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melarikan wanita "yg belum dewasa" sebagaimana pada dakwaan tunggal. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa selama tiga bulan. Dan output putusan ini nir sinkron menggunakan pasal 332 KUHP.

Landasan pada pertimbangan yang diberikan oleh Hakim pada saat memutuskan kasus membawa kabur perempuan yang usianya belum dewasa merupakan pertimbangan

secara yuridis dari aturan yang terungkap pada persidangan buat menandakan adanya perbuatan salah terdakwa dan pertimbangan kondisi serta sifat yg masih ada pada terdakwa yang terdapat pada persidangan yang selanjutnya dapat meringankan atau memberatkan waktu lamanya hukuman terdakwa. (Putra and others 2015)

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif berdasarkan hukum dari peraturan dan ketentuan hukum. Penulis menggunakan data bahan hukum dengan sifat primer dan mengikat yaitu peraturan perundang-undangan. Selanjutnya juga menggunakan Data hukum yang bersifat sekunder ini merupakan bahan hukum yang sifatnya tidak mengikat melainkan bisa memberikan penjelsan data hukum primer dan merupakan suatu hasil kompilasi pemikiran atau gagasan yang khusus pada bidang tertentu dan nantinya memberikan petunjuk arah penelitian ini. Sumber bahan hukum sekunder didapat dalam buku, jurnal hukum dan internet.

Bahan dan data hukum yang sudah diperoleh, makan segera dilakukan inventarisasi dan identifikasi secara bersifat kualitatif dan menggunakan logika secara deduksi yaitu pengertian dari umum lalu ditarik kesimpulan. Penggunaan pendekatan penelitian yang mempunyai sifat kualitatif akan mendukung kemudahan dalam melakukan penyesuaian jika dihadapkan pada kenyataan pelaksanaan yang terjadi, pada metode ini memberikan penyajian yang pada prinsipnya merupakan kaitan dengan hubungan penulis dan perbuatan yang akan menjadi pembahasan dalam permasalahan yang diambil.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana melarikan wanita yang belum cukup umur

Istilah tentang adanya bentuk tanggung jawab secara pidana di luar negeri dikenal dengan istilah *theorekenbaardheid* atau pertanggungjawaban pidana, yang bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan guna menentukan apakah terdakwa atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan. Agar pelaku dapat dipidana, maka delik yang dilakukan oleh pelaku harus memenuhi ciri-ciri

delik yang ditentukan dalam undang-undang yang berlaku. Dari perspektif melakukan pelanggaran yang dilarang, seseorang bertanggung jawab atas tindakannya jika tindakannya ilegal dan tidak ada pembenaran atau larangan ilegal atas pelanggaran yang dilakukannya. Dan untuk tanggung jawab, hanya mereka yang mempunyai kemampuan dalam menerima tanggung jawab atas tindakannya.

Pertanggungjawaban pidana mengarah pada pengenaan pidana terhadap pelaku apabila ia sudah menjalankan perbuatan pidana dan dalam melakukan pemenuhan syarat yang ditentukan dalam peraturan. Sudut pandang tanggung jawab, hal itu menunjukkan bahwa hanya satu orang yang “bertanggung jawab” yang diberi tanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana karena memperkosa perempuan yang usianya di bawah umur tanpa izin orang tua termasuk dalam delik paralel, yaitu di mana satu orang melakukan dua atau lebih pelanggaran atau antara pelanggaran awal dan pelanggaran berikutnya. kejahatan tidak dibatasi oleh keputusan pengadilan.

Pengaturan perbuatan perbarengan pada Pasal 63 sampai 71 Bab VI KUHP, dengan pembagian sebagai berikut :

1. Concursum Idealis (Perbarengan Peraturan)

Perbuatan termasuk dalam lebih dari satu jenis pelanggaran hukum pidana. Intinya perjanjian itu hanya di kepala, perbuatan itu hanya perbuatan, tetapi sekaligus melanggar beberapa pasal KUHP. Sistem pemidanaan yang digunakan dalam kesepakatan idealis tersebut adalah sistem absorpsi.

Profesor Simons memberikan pendapat “pada suatu kondisi orang harus bisa memberikan perbedaan apakah pelaku hanya berbuat satu perbuatan artinya pada yang sebenarnya, sehingga sebagai bentuk pelaksanaan yang bersifat material bahwa sudah melakukan beberapa perbuatan”. Pengaturan perbuatan concursum idealis pada Pasal 63 KUHP :

- (1). Apabila tindakan dicakup oleh beberapa hukuman, hanya satu dari ketentuan ini yang akan berlaku. Jika berbeda, maka yang dijatuhkan termasuk pidana yang bersifat pokok dan paling memberatkan.
- (2). Apabila tindakan dicakup pada KUHP, maka juga dicakup dalam KUHP Khusus, dalam hal hanya KUHP Khusus yang berlaku.

Pasal 63 ayat (1) Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa apabila perbuatan yang dijalankan oleh seseorang dengan pelanggaran lebih dari satu jenis pelanggaran di hukum pidana, maka pada umumnya dapat dikabulkan pemberlakuan peraturan-peraturan tandingan. Bagian 63(2) menyimpulkan bahwa peraturan umum harus dicabut dalam hal pelanggaran yang termasuk dalam rezim khusus dari peraturan itu.

2. Delictuum Continuatum Voorgezettehandelin

Perbuatan yang bersifat berlanjut pada Pasal 64 KUHP, pembuat UU memberikan pendapat tentang serangkaian tindakan yang tampaknya independen, yang tetap berhubungan dengan mereka yang terkena dampak sehingga tindakan tersebut sebagai tindakan yang koheren.

Syarat dari suatu tindakan sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai tindakan yang berkelanjutan :

- a. Jika perbuatan tergugat merupakan pelaksanaan putusan yang dilarang
 - b. Jika perbuatan terdakwa mengarah pada kejahatan serupa
 - c. Dalam hal tidak ada jangka waktu yang relatif lama antara dilakukannya suatu kejahatan dengan dilakukannya kejahatan lain,
- sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang terus menerus, hanya berlaku satu aturan hukuman, meskipun setiap perbuatan menjadi suatu bentuk pelanggaran ringan dan bentuk kejahatan. Apabila hukuman berbeda, maka aturan hukuman dengan paling berat sebagai yang berlaku.

Pasal 64 dapat diambil kesimpulan bahwa ada tindakan yang terus-menerus atau suatu perbuatan jika perbuatan itu merupakan suatu pelanggaran ringan atau kejahatan tetapi ada hubungannya sehingga dianggap sebagai perbuatan yang terus-menerus. Seseorang melakukan lebih dari satu tindakan (pelanggaran atau kejahatan) yang saling terkait sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang koheren.

3. Concursum Realis (Perbarengan dari Perbuatan)

Hal ini muncul ketika seorang berbuat kejahatan pada beberapa jenis perbuatan, setiap tindakan merupakan kejahatan yang terpisah (tidak harus sama dan tidak harus terkait). Pengaturan ini pada Pasal 65, 66, 67 KUHP. Sifat *concursum realis*:

- a. Adanya seorang yang menjadi pembuat

- b. Serangkaian urutan pada perbuatan pidana yang sudah dilakukannya
- c. Perbuatan pidana tidak memerlukan adanya berkaitan satu dengan yang lainnya

Perbuatan pidana tidak memerlukan adanya keputusan dari pengadilan pada Pasal 65 KUHP yaitu:

- 1) Pada gabungan terhadap beberapa perbuatan masing – masing sifatnya tidak terkait dengan yang lain dan merupakan kejahatan dengan pidana yang sifatnya pokok yang sama, sehingga hanya diberikan hukuman pada satu pidana.
- 2) Pidana maksimum adalah hukuman maksimum yang diberikan pada pelanggaran juga tidak diperbolehkan melebihi dari pidana yang dinilai ter berat dengan dilakukan penambahan sebesar sepertiga. Seperti disebutkan di atas dalam Pasal 65 KUHP, itu adalah kombinasi dari pelanggaran dengan hukuman yang serupa.

Pasal 65 ayat (1) KUHP dapat diambil kesimpulan bahwa seorang melakukan beberapa tindak pidana hanya akan dipidana jika ancaman pidananya merupakan salah satu jenis pidana. Sedangkan pada Pasal 63 ayat (2) KUHP memberikan simpulan bahwa hukuman yang diberikan tidak diperbolehkan lebih dari kejahatan yang terberat dengan dilakukan penambahan sepertiganya.

Seorang bertanggung jawab jika pelaku bermaksud melarikan diri dari berhubungan seks dengan perempuan di bawah umur. Pelaku dianggap tidak sah karena melakukan perbuatan pidana mengambil perempuan yang masih berusia di bawah umur dengan tidak adanya persetujuan keluarganya tetapi atas kehendaknya. Dia melakukan aktivitas seksual terhadap dirinya sendiri dan wanita di bawah umur untuk menarik mereka dan melakukan hubungan seksual dengan mereka. Perbuatan pelaku juga memiliki komponen terencana, yaitu aktivitas seksual yang ditujukan kepada sang gadis. Hukuman yang dijatuhkan hakim, hakim merujuk Pasal 332 KUHP, sehingga belum adanya pemenuhan aspek keadilan dalam masyarakat.

Para pelaku tidak hanya kawin lari dengan wanita yang belum dewasa, tetapi juga melakukan hubungan seksual yang jelas-jelas ilegal, karena tindakan tersebut secara literal baik menurut KUHP maupun UU Perlindungan Pemuda. Serta tergolong unsur niat karena perbuatannya diawali dengan niat dan pelaku memiliki tujuan dan maksud yang jelas ketika melakukan perbuatannya. Di sini menjadi sangat jelas bahwa pelaku dapat dimintai

pertanggungjawaban atas perbuatannya, karena orang yang sehat jasmani mengetahui bahwa perbuatannya itu haram dan dapat melaksanakan kehendaknya secara sadar akan dimintai pertanggungjawaban.

Perbuatan terdakwa menculik perempuan di bawah umur untuk melakukan hubungan badan adalah terencana dan menyimpang secara seksual. Pelaku dengan sengaja membawa pergi korban tanpa memperoleh izin dari orang tua, dan ketika korban melarikan diri, pelaku dengan sengaja memberikan bujukan kepada korban untuk berhubungan seks dengan adanya bukti dari keterangan saksi.

Pertanggungjawaban secara pidana yang melarikan wanita dengan usia yang belum mencapai usia dewasa berdasarkan KUHP dapat dipidana penjara maksimal lamanya selama 7 (tujuh) tahun dengan dasar Pasal 332 ayat (1) ke- 1 KUHP. Kemudian pertanggungjawaban secara hukum terhadap perbuatan menyetubuhi anak yang usia belum dewasa diatur pada UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perlindungan terhadap anak di UU Perlindungan Anak diatur pada Pasal 81 dan 82 :

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Pertanggungjawaban pidana timbul pada perbuatan dan kesalahan pelaku pidana ketika seseorang sudah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi syarat yang ditentukan UU. Aspek pertanggungjawaban pidana yang paling utama adalah asas pertanggungjawaban pidana, yaitu tiada kejahatan tanpa sebab (*geen straf zonder scul*), artinya pelaku kejahatan akan dipidana jika ia dapat dituduh melakukan kejahatan tersebut.

Menurut pendapat Martiman Prodjohamidjojo, "Adanya kemampuan melakukan tanggung jawab, hanya seorang yang bertanggung jawab yang dapat bertanggung jawab.

Seseorang dianggap bertanggung jawab apabila :
Keadaan mental, penyakit permanen atau sementara tidak mencegah, tidak mencegah keterbelakangan mental (idiot, tolol, bodoh, dll.), Tidak mencegah syok, hipnosis, kemarahan yang meluap-luap, pengaruh subliminal, air liur, demam. Dapat melihat hakekat perbuatannya, tahu bagaimana mengarahkan kehendak atau perbuatannya, tahu bagaimana menilai suatu perbuatan.

Pertanggungjawaban secara pidana kepada pelaku perbuatan pidana dengan membawa kabur perempuan yang usianya belum cukup umur berdasarkan KUHP memberikan hukuman penjara maksimal 7 (tujuh) tahun dengan dasar Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dari aturan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku dengan sengaja dan sadar menculik perempuan yang belum dewasa dan menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, melakukan hubungan seksual, dan membujuk korban untuk mencapai tujuan pelaku. Hesewinkel Slinga juga secara resmi mengatakan itu adalah kejahatan Pasal 63 ayat (1) KUHP memberikan pengaturan tentang *concursum idealis*, yang mengharuskan adanya perbuatan yang telah memenuhi seluruh unsur pada rumusan pada pidana yang lain.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana mengangkuat perempuan di bawah umur untuk melakukan hubungan seksual tanpa izin orang tua dalam perkara /36/Pid.B/2019 PN GST, ditetapkan terdakwa atau bersalah membawa perempuan di bawah umur untuk melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk menjamin bahwa mereka mengendalikan wanita-wanita ini tanpa kehendak orang tua atau wali mereka, tetapi dengan persetujuan mereka. Penerapan pada ketentuan secara hukum pidana yang bersifat materil pada putusan Nomor: 36/Pid.B/2019 PN GST, seharusnya tidak hanya dengan dasar Pasal 332 ayat 1 KUHP tetapi juga harus adanya penerapan Pasal 81 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan secara Hukum yang diambil oleh Hakim berdasarkan adanya pertimbangan dari Penuntut Umum dan Hakim sehingga hukuman yang diberikan harusnya tidak hanya 10 (sepuluh) bulan penjara apabila diterapkan Pasal 81 UU Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Refika Aditama)
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: Cahaya Baru)
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, 3rd edn (Jakarta: Rineka Cipta)
- Imran, Ali, Ferdicka Nggeboe, and Bunyamin Alamsyah. 2021. 'Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur Dan Penyelesaiannya Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur', *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13.2: 166 <<https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.285>>
- Irfan, Muhammad Nurul. 2009. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI)
- Marpaung, Leden. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Misran, Misran, and Arif Firmansyah. 2018. 'Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 332 Kuhp Tentang Melarikan Perempuan Di Bawah Umur: Analisis Putusan PN. Ba293/Pid/B/2015/PN. Bna', *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 7.2: 284–306
- Moeljotno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, 8th edn (Jakarta: Rineka Cipta)
- Munajat, Makhrus. 2004. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka)
- Putra, I Gusti Bagus Eka Pramana, I Ketut Mertha, and I Wayan Suardana. 2015. 'Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melarikan Wanita Yang Belum Cukup Umur', *Jurnal Hukum*, 7: 1–5
- Salim, HS. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Setiawan, Dani. 2019. 'Tindak Pidana Melarikan Anak Perempuan Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 532/Pid. Sus/2015/PN. Smn)' (Universitas Jenderal Soedirman)